



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSIRAWAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak. Rancangan awal Renja 2021 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra 2016-2021

Rancangan awal Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rancangan awal Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2021, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan tenaga dalam menyusun RENJA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 ini, kami sampaikan terima kasih.

Muara Beliti, Agustus 2021
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Dr. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680205 199401 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan Renja	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra	7
B. Analisa Kinerja Pelayanan	17
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	21
D. Review Terhadap Rencana Kerja RKPD.....	22
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	32
B. Tujuan dan Sasaran Renja	33
C. Program dan Kegiatan	35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
A. Rumusan Program	37
B. Tabel Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	38
BAB V. PENUTUP	43
LAMPIRAN (Tabel Program dan Kegiatan Rancangan awal RENJA OPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Rencana Perubahan program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 - 2021 dengan prioritas kebijakan pada pembangunan kualitas hidup manusia, point 5 pada Agenda Nawacita Pemerintah dan mendorong pada pengentasan kemiskinan guna mewujudkan keluarga yang berencana dan sejahtera dengan memberdayakan potensi lokal daerah yang tersusun melalui hierarki sistem perencanaan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 disusun selaras dengan VISI yaitu **”TERWUJUDNYA MUSI RAWAS MAJU, MANDIRI, DAN BERMARTABAT (MANTAB)”** yang mana pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia tertuang dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA Nomor 5 (lima).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolah keuangan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolah Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD Musi Rawas 2005-2025) Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Priode Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 65);

3.1 Maksud dan Tujuan

Maksud tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah memberikan arah dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan dalam pelayanan pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Sedangkan tujuan :

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah :

1. Acuan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Musi Rawas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

4.1 Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja, Program dan kegiatan.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi Tabel Mengenai Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas beserta Panduannya.

BAB. V PENUTUP

LAMPIRAN

(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dan Prakiraaan Maju Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas).

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan tercapainya target kinerja program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
4. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut ini disajikan realisasi Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas serta target Renja Perubahan Tahun Berjalan dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program Kegiatan Renja Tahun 2020	Realisasi Capaian Target Renja Tahun 2020	
					Target Renja	Realisasi Renja	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim selama 1 Tahun	3.993.000	1.515.000	1.875.000	1.184.500	63,17	972.000	882.000	90,74
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar	87.846.000	37.726.290	44.100.000	38.071.578	86,33	35.836.000	35.475.813	98,99
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	11.979.000	-	-	-	0,00	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penzinaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar	27.951.000	13.941.550	18.440.000	14.397.475	78,08	11.904.000	11.705.400	98,33
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Admintrasi Keuangan yang dibayar	183.678.000	113.721.000	61.620.000	61.620.000	100,00	66.480.000	66.480.000	100,00
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Jumlah jenis	29.282.000	25.184.000	25.199.000	25.199.000	100,00	21.482.000	21.480.000	99,99
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	79.860.000	45.751.300	45.772.000	45.772.000	100,00	35.750.000	35.746.000	99,99

8	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	22.627.000	15.783.380	25.842.000	25.842.000	100,00	9.817400	9.817400	100,00
9	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33.275.000	14.475.500	7.543.000	7.543.000	100,00	1.834.000	1.834.000	100,00
10	Penyediaan Bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Sarana Informasi media massa yang Berlangganan	51.909.000	34.065.000	34.100.000	34.060.000	99,88	25.290.000	25.290.000	100,00
11	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	114.466.000	101.632.000	93.528.000	93.507.000	99,98	39.752.000	39.752.000	100,00
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	332.750.000	198.981.347	211.637.700	211.634.527	100,00	80.788.840	80.788.600	99,99
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah	39.930.000	13.600.000	10.000.000	10.000.000	100,00	7.167.200	7.155.00	99,83
14	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung Adminitrasi Teknis/ Perkantoran yang dibayar	578.985.000	451.400.000	845.100.000	841.950.000	99,63	1.101.600.000	1.099.600.000	99,82
15	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Jumlah jenis Dokumentasi Publikasi dan Dekorasi	21.296.000	43.100.000	43.500.000	40.480.000	93,06	4.500.000	4.500.000	100,00

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	255.968.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	225.205.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi	7.986.000	40.650.000	12.700.000	11.900.000	93,70	400.000	400.000	100,00
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Komputer 2 dan Lemptop 2	145.000.000	-	45.950.000	45.950.000	100,00	34.800.000	34.800.000	100,00
5	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Pengadaan Mebeleur kantor	452.540.000	153.195.000	5.400.000	5.400.000	100,00	-	-	0,00
6	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapan	Jumlah Komputer PC/Notebook Kantor yang Tersedia	145.000.000	341.041.000	-	-	0,00	-	-	0,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	1.100.000	36.400.000	18.400.000	18.378.000	99,88	2.850.000	2.800.000	98,25
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara	235.587.000	126.488.804	140.630.000	136.141.500	96,81	59.730.000	59.723.150	99,99
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan kantor yang dipelihara	-	9.823.550	10.250.000	9.689.550	94,53	4.350.000	4.193.200	96,40

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	83.853.000	21.950.000	42.000.000	42.000.000	100,00	-	-	0,00
2	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	74.536.000	25.070.216	12.000.000	10.800.000	90,00	11.462.800	11.462.800	100,00
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	53.240.000	36.700.000	31.110.300	31.110.300	100,00	25.352.000	25.351.900	99,99
2	Penyusunan Dokumen dan Regulasi Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang	-	-	40.000.000	39.310.550	98,28	-	-	0,00
V	Program Keluarga Berencana									
1	Pelayanan KIE	Jumlah Jenis Media yang Digunakan	375.648.796	277.665.900	268.479.000	266.991.150	99,45	88.442.000	88.442.000	100,00

2	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Kepada PUS Peserta KB Aktif melalui Pemenuhan Operasional Balai Penyuluh KB	1.190.000.000	1.067.690.825	1.357.200.000	1.222.521.100	90,08	1.525.496.000	1.089.898.800	71,45
3	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	1.577.718.153	1.021.860.000	1.181.124.000	1.139.764.200	96,50	1.084.598.000	1.013.826.300	93,47
4	Peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Hak Reproduksi Individu	89.310.100	-	-	-	0,00	-	-	0,00
5	Pendataan Keluarga	Jumlah Petugas Pendata	257.288.350	89.470.500	86.035.500	85.327.600	99,18	2.000.000	1.950.000	97,50
6	Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	121.778.360	57.427.425	49.610.000	48.630.000	98,02	380.000	380.000	100,00
7	Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB	Jumlah Personal, Jumlah kali	110.060.808	100.055.280	32.000.000	31.292.800	97,79	2.715.000	2.715.000	100,00
8	Penyelenggara Manajemen BOKB	Jumlah Orang, Jumlah Kegiatan	300.178.434	173.866.500	225.529.000	224.463.000	99,53	103.680.000	103.680.000	100,00

VI	Program Kesehatan Reproduksi Remaja									
1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Peserta PUP (Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan)	189.199.494	35.700.000	83.219.000	82.240.000	98,82	502.000	495.000	98,61
VII	Program Pelayanan Kontrasepsi KB									
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif bagi PUS Keluarga Miskin	280.176.831	174.720.625	174.460.000	172.302.155	98,76	46.845.660	46.650.000	99,58
2	Penyelenggaraan Operasional Klinik KB	jumlah Fasilitas Kesehatan KB	132.433.169	97.259.000	98.449.000	98.129.800	99,68	119.759.000	114.587.850	95,68
3	Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi	Jumlah Kasus komplikasi kontrasepsi yang ditangani	21.296.000	-	-	-	0,00	1.000.000	-	0,00
VIII	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri									
1	Orientasi Program KB bagi Masyarakat dalam Pembinaan KB/KR yang Mandiri	Terwujudnya Pembinaan KB/KR yang mandiri bagi Masyarakat	59.291.000	-	-	-	0,00	-	-	0,00

2	Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB	Jumlah Petugas Pelaksana Program KB di Lini Lapangan yang dibina	2.314.805.988	1.510.000.000	1.465.148.000	1.465.146.000	100,00	1.195.530.000	1.195.530.000	100,00
3	Hari Keluarga Nasional	Terlaksanannya Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kabupaten Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	251.897.074	145.942.000	20.432.500	20.322.500	99,46	16.116.000	16.116.000	100,00
4	Gerakan Kampung KB	Jumlah Gerakan Kampung KB	2.055.859.938	902.918.520	1.634.935.500	1.411.259.800	86,32	1.209.604.000	1.125.377.000	93,04
IX	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga									
1	Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Terjadinya Peningkatan Keluarga yang ikut Aktif dikelompok Bina-bina Baik ditingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
2	Pengembangan Bina Keluarga	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Kegiatan yang Dibina	25.996.135	135.608.500	71.062.500	70.876.500	99,74	3.730.000	3.730.000	100,00

Realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Evaluasi kinerja Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang belum terlaksana 100%, untuk diusulkan pada RKPD Tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi usulan program dan kegiatan tahun 2020 dari 9 (sembilan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp. 6.982.515.900,-** terealisasi dengan jumlah program dan kegiatan yang sama namun dengan jumlah dana sebesar **Rp. 6.382.615.213,-** atau 91,41%. Usulan sebelumnya (Renstra Awal 2016-2021) terdiri dari 9 (sembilan) program dan 39 (empat puluh sembilan) kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.123.535.700,-. Sementara itu usulan 2021 terdiri dari 4 (empat) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan dengan jumlah dana sebesar **Rp. 15.386.155.500,-**. Berkurangnya jumlah program dan kegiatan ini telah melalui penyeleksian program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang sasaran strategis yang hendak dicapai

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan tercapainya target kinerja program/kegiatan

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang baik dari segi fisik maupun anggaran. Selain itu dukungan petugas di lini lapangan (termasuk TKS) menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya program dan kegiatan KB dan KS.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Meskipun program dan kegiatan penyerapan anggarannya sebagian besar tidak mencapai target (100%) namun penyerapan berkisar 90 hingga 99 persen. Beberapa kegiatan yang tidak terserap dengan baik anggarannya malah terjadi pada kegiatan rutin. Hal ini tentu saja menjadi evaluasi bagi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana untuk menyusun perencanaan yang lebih baik lagi pada tahun anggaran berikutnya. Selain penyerapan anggaran, yang menjadi perhatian adalah adanya beberapa kegiatan yang tidak akan dilaksanakan pada tahun 2021. Hal ini terkait

dengan adanya efisiensi dana sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan penyeleksian kembali program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan OPD dalam melaksanakan sasaran strategis yang telah ditentukan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh tersedianya anggaran, maka hal ini berimplikasi tidak tercapainya target capaian Renstra 2016-2021 (100%). Selain itu, peralihan Badan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menambah beberapa sub bidang dimana akan terjadi penambahan program dan kegiatan yang baru ataupun dahulu pernah dilaksanakan untuk menjadi program dan kegiatan usulan 2019. Hal ini berimplikasi pada Renstra 2016-2021 sehingga perlu direvisi karena tidak sesuai lagi dengan target capaian tahun pertama.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2020 dan Renstra 2016-2021
2. Perubahan parameter dan sasaran strategis
3. Efisiensi alokasi belanja
4. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum maksimal dan kegiatan yang baru dalam mendukung terwujudnya misi kabupaten

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel. 2.2 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	SPM/ Indikator Nasional	Target Renstra (%)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 Th	3,5	1,84	1,83	1,82	1,81	1,09	2,33	1,82	1,81	
2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	5	12,28	12,18	12,08	11,98	12,82	12,11	12,08	11,98	
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	70	82	83	84	85	80	84	84	85	
4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB	87	84	85	86	87	82,97	83,09	86	87	
5	Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/kelurahan	90	92	94	96	98	95	96	96	98	
6	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate/CPR)	78,5	71,98	72,28	72,58	72,88	75,03	76,94	72,58	72,88	

2.2.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Masing - masing Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
 3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).
 - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 3. Seksi Data dan Informasi.

Tabel 2.3.
**Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**

No	Komposisi Pegawai	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Jabatan Struktural/Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Administratif	33	08	21 Struktural
2.	Tenaga Teknis Fungsional	-	-	- Fungsional
3.	Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	27	120	27 Fungsional
	Jumlah	60	128	188 Orang

2.2.2. Kedudukan Dinas

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas perbantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpengaruh juga terhadap keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang baik, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
4. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
5. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
6. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
7. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
8. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
9. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai namun besarnya berbeda;

Renja Perubahan RKPD atau Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan sbb.:
 1. Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk.
 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan survei/pendataan Indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan
 3. Sub Kegiatan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal
 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 1. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
 2. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 5. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 1. Sub Kegiatan Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 2. Sub Kegiatan Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)

3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 2. Sub Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode Sub Kegiatan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 4. Sub Kegiatan Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 5. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 2. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
 2. Sub Kegiatan Orientasi/Pealtihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 3. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatannketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/UPPKS)

4. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut-usian serta pengelolaan keuangan keluarga)
5. Sub Kegiatan Sosialisasi IPK

Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.941.275.454	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.590.925.576	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				5.768.598.054	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota				5.839.770.876	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	1. Presentase dokumen perencanaan sesuai peraturan 2. Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	1. 100% 2. 100 %	67.346.200	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	1. Presentase dokumen perencanaan sesuai peraturan 2. Persentase dokumen pelaporan kinerja tepat waktu	1. 100% 2. 100 %	23.474.600	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	jumlah dokumen perencanaan pernagkat daerah yang disusun	7 Dokumen	12.919.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	jumlah dokumen perencanaan pernagkat daerah yang disusun	7 Dokumen	11.298.900	
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan anggaran yang disusun	1 Dokumen	11.154.800	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan anggaran yang disusun	1 Dokumen	10.133.900	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan anggaran Perubahan yang disusun	1 Dokumen	11.067.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan dan anggaran Perubahan yang disusun	1 Dokumen	1.020.900	
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang disusun	1 Dokumen	8.215.200	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang disusun	1 Dokumen	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas yang disusun	1 Dokumen	8.465.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas yang disusun	1 Dokumen	-	
6	koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	jumlah laporan pertanggungjawaban evaluasi perangkat daerah yang tersedia	4 laporan	15.524.000	koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	jumlah laporan pertanggungjawaban evaluasi perangkat daerah yang tersedia	4 laporan	1.020.900	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	1. Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu 2. Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	1. 100% 2. 100 %	3.279.846.152	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	1. Persentase laporan keuangan sesuai peraturan dan tepat waktu 2. Persentase laporan BMD sesuai aturan dan tepat waktu	1. 100% 2. 100 %	3.670.452.204	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah gaji dan Tunjangan tenaga ASN yang bayar selama 1 Tahun	14 Bulan	3.163.895.302	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah gaji dan Tunjangan tenaga ASN yang bayar selama 1 Tahun	14 Bulan	3.586.340.054	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen kegiatan/sub kegiatan yang diverifikasi	45 kegiatan	101.059.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen kegiatan/sub kegiatan yang diverifikasi	45 kegiatan	82.686.750	
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semu	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun	4 Dokumen	14.891.150	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semu	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun	4 Dokumen	1.425.400	

	steran SKPD					teran SKPD					
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas			8.519.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas			7.319.800	
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah yang disusun		8.519.600	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah yang disusun		7.319.800	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP	80%	25.012.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP	80%	-	
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 Orang	25.012.000	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	2 Orang	-	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pegawai dengan Nilai kinerja minimal Baik	85%	256.009.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pegawai dengan Nilai kinerja minimal Baik	85%	84.607.800	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 Jenis	1.175.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 Jenis	38.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Peralatan dan Perlegkapan gedung Kantor yang tersedia	4 Unit	24.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Peralatan dan Perlegkapan gedung Kantor yang tersedia	4 Unit	-	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah papan/karangan bunga yang tersedia	51 Buah	24.068.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah papan/karangan bunga yang tersedia	51 Buah	7.503.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah sarana Informasi Media Massa yang berlangganan	6.712 Eksemplar	43.960.800	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah sarana Informasi Media Massa yang berlangganan	6.712 Eksemplar	25.926.800	

5	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi dan Luar Propinsi yang tersedia	38 kali	162.806.000	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi dan Luar Propinsi yang tersedia	38 kali	51.140.000	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman Disiplin	5%	2.012.775.472	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase Pegawai yang tidak mendapat hukuman Disiplin	5%	2.008.669.972	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah surat yang terkirim	20 Surat	430.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah surat yang terkirim	20 Surat	430.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	36 Rekening	37.776.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	36 Rekening	34.871.000	
3	Penyediaan Jasa Umum Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah jasa tenaga kerja tenaga lainnya dan penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB) non PNS yang tersedia	1.524 Orang/bulan	1.974.568.972	Penyediaan Jasa Umum Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah jasa tenaga kerja tenaga lainnya dan penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB) non PNS yang tersedia	1.524 Orang/bulan	1.973.368.972	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Persentase pegawai dengan Nilai kinerja minimal Baik	95%	119.088.830	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Persentase pegawai dengan Nilai kinerja minimal Baik	95%	45.246.500	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Unit	27.619.700	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Unit	6.424.700	

2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah sarana Informasi Media Massa yang berlangganan	63 Unit	84.566.800	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah sarana Informasi Media Massa yang berlangganan	63 Unit	36.821.800	
3	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi dan Luar Propinsi yang tersedia		6.000.000	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Rapat Koordinasi, Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi dan Luar Propinsi yang tersedia		2.000.000	
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Bangunan gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	902.330	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Bangunan gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	-	
	Urusan Wajib					Urusan Wajib					
	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	DPPKB Kab.Musi Rawas			6.172.677.400	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	DPPKB Kab.Musi Rawas			5.751.154.700	
	Program Pengendalian Penduduk		1. Persentase kampung KB mandiri 2. Indeks kualitas Data dan informasi bangga Kencana	1. 20 % 2. 100 %	92.131.000	Program Pengendalian Penduduk		1. Persentase kampung KB mandiri 2. Indeks kualitas Data dan informasi bangga Kencana	1. 20 % 2. 100 %	1.978.200	
VIII	Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase Kampung KB mandiri	20%	53.967.700	Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase Kampung KB mandiri	20%	1.090.600	

1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah dokumen GDPK yang tersedia	1 Dokumen	-	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah dokumen GDPK yang tersedia	1 Dokumen	-	
2	Pelaksanaan survei/pendataan Indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah responden survei/indek pengetahuan masyarakat tentang kependudukan di Kampung KB	395 kk	29.267.700	Pelaksanaan survei/pendataan Indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah responden survei/indek pengetahuan masyarakat tentang kependudukan di Kampung KB	395 kk	257.400	
3	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal dan informal	14 Orang	24.700.000	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal dan informal	14 Orang	833.200	
IX	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DPPKB Kab.Musi Rawas	indeks kualitas Data dan Informasi Bangsa Kencana		38.163.300	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DPPKB Kab.Musi Rawas	indeks kualitas Data dan Informasi Bangsa Kencana		887.600	
1	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah dokumen Statistik Rutin Kependudukan dan KB yang disusun	14 dokumen	38.163.300	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah dokumen Statistik Rutin Kependudukan dan KB yang disusun	14 dokumen	887.600	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB Kab.Musi Rawas	1. Persentase peningkatan pelayanan KIE 2. Cakupam Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif	1. 50 % 2. 72,58 %	5.057.102.400	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB Kab.Musi Rawas	1. Persentase peningkatan pelayanan KIE 2. Cakupam Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif	1. 50 % 2. 72,58 %	4.854.485.100	

X	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana	50%	2.338.949.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana	50%	2.282.297.500	
1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		Jumlah petugas BP4/Mitra kerja yang diberikan bantuan operasional	168 Orang Bulan	37.857.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		Jumlah petugas BP4/Mitra kerja yang diberikan bantuan operasional	168 Orang Bulan	1.464.800	
2	Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Proqram KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta sosialisasi ,informasi KIE program Bangga Kencana Kepada masyarakat	280 orang	20.742.000	Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Proqram KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta sosialisasi ,informasi KIE program Bangga Kencana Kepada masyarakat	280 orang	482.700	
3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Media Kie	7 Jenis	84.448.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Media Kie	7 Jenis	84.448.000	
4	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah frekuensi balai Penyuluhan KB yang diberikan operasional dan sarana selama 1 tahun	168 Kali	2.094.050.000	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah frekuensi balai Penyuluhan KB yang diberikan operasional dan sarana selama 1 tahun	168 Kali	2.094.050.000	
5	Pengendalian Program KKBPK	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta Kegiatan Rapat , Pertemuan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program KKBPK dibalai Penyuluh, Kampung Kb serta Kader	3.000 Orang	101.852.000	Pengendalian Program KKBPK	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta Kegiatan Rapat , Pertemuan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program KKBPK dibalai Penyuluh, Kampung Kb serta Kader	3.000 Orang	101.852.000	

XI	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB PKB/PLKB)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana	50,0	978.550.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB PKB/PLKB)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana	50,0	956.953.000	
1	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah tenaga Penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB) yang di bina	280 Orang	23.350.000	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah tenaga Penyuluh lapangan KB (PKB/PLKB) yang di bina	280 Orang	1.753.000	
2	Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah jasa Kader persiapan Program KKBPK Berbasis data dan pelaksanaan KIE yang dibayar	4.776 OB	955.200.000	Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah jasa Kader persiapan Program KKBPK Berbasis data dan pelaksanaan KIE yang dibayar	4.776 OB	955.200.000	
XII	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupam Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif	72,50 %	993.645.500	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Cakupam Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif	72,50 %	897.576.300	
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Alokon yang didistribusikan ke fasilitas kesehatan (Faskes)KB	184 paket	63.855.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Alokon yang didistribusikan ke fasilitas kesehatan (Faskes)KB	184 paket	63.855.000	
2	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta KB Baru dan Aktif MKJP		783.793.000	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah peserta KB Baru dan Aktif MKJP		783.793.000	

3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Kasus Komplikasi Kontrasepsi yang ditangani	2 kasus	2.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	DPPKB Kab.Musi Rawas	Jumlah Kasus Komplikasi Kontrasepsi yang ditangani	2 kasus	2.000.000	
4	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencanaan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		Jumlah laporan pelayanan KB di Faskes KB	564 laporan	40.498.500	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencanaan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya		Jumlah laporan pelayanan KB di Faskes KB	564 laporan	477.600	
5	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Akseptor yang dilayani	1476 akseptor	103.499.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Akseptor yang dilayani	1476 akseptor	47.450.700	
XIII	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase Kampung KB mandiri	20%	745.957.900	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	Persentase Kampung KB mandiri	20%	717.658.300	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah pertemuan/rapat koordinasi kegiatan di 25 kampung KB	575 Kali	715.904.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah pertemuan/rapat koordinasi kegiatan di 25 kampung KB	575 Kali	715.904.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Pembinaan Kampung KB menjadi kampung berkualitas	4 kali	30.053.900	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Pembinaan Kampung KB menjadi kampung berkualitas	4 kali	1.754.300	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		1. Persentase Baduta Stunting 2. Persentase Keluarga yang berwirausaha	1. 30 % 2. 10,2 %	1.023.444.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		1. Persentase Baduta Stunting 2. Persentase Keluarga yang berwirausaha	1. 30 % 2. 10,2 %	894.691.400	
XIV	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan		Indek pembangunana keluarga	51,57 %	1.023.444.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan		Indek pembangunana keluarga	51,57 %	894.691.400	

	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		Jumlah unit pengadaan BKB Kit, BKL Kit, dan UPPKS yang tersedia	100 Unit	275.500.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)		Jumlah unit pengadaan BKB Kit, BKL Kit, dan UPPKS yang tersedia	100 Unit	275.500.000	
	Orientasi/Pealtihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		jumlah peserta pelatihan /Pembinaan Kelompok Kegiatan	14 Orang	25.329.000	Orientasi/Pealtihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		jumlah peserta pelatihan /Pembinaan Kelompok Kegiatan	14 Orang	784.200	
	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/UPPKS)		Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan momentum	1 kelompok	86.015.000	Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/UPPKS)		Jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan momentum	1 kelompok	4.007.600	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut-usian serta pengelolaan keuangan keluarga))		Jumlah catin dan 1000 HGPK yang mendapatkan sosialisasi		611.600.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut-usian serta pengelolaan keuangan keluarga))		Jumlah catin dan 1000 HGPK yang mendapatkan sosialisasi		611.600.000	
	Sosialisasi IPK		Jumlah peserta sosialisasi IPK	240 orang	25.000.000	Sosialisasi IPK		Jumlah peserta sosialisasi IPK	240 orang	2.799.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang disajikan, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dapat diidentifikasi yaitu adanya pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang langsung menjangkau lokasi tempat tinggal mereka sehingga dalam memperoleh pelayanan KB tidak membutuhkan *cost* yang tinggi untuk menjangkau tempat-tempat pelayanan.

Upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2013-2017 adalah melakukan pelayanan secara mobile dan rutin melalui Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN) dan Mobil Unit Penerangan (MUPEN). Sedangkan untuk pembinaan kepada kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat juga dilakukan secara berkala, misalnya terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok-kelompok lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan ekonomi produktif keluarga (UPPKS = Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Namun memang pada faktanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok di masyarakat tersebut sering terjadi fluktuasi (pasang surut) dalam aktifitasnya. Tetapi hal ini terus diupayakan untuk tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak hilang dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merujuk pada sasaran dan kebijakan BKKBN Pusat. BKKBN merupakan LPNK (Lembaga Pemerinatahan Non Kementerian) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menentukan sasaran strategis guna capaian kinerja yang telah direncanakan. Berikut Kesepakatan Kinerja Program KKBPK Musi Rawas Tahun 2021 :

1. Sasaran Strategis

A. Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB

- 1). Prevalensi peserta KB aktif (CPR)
- 2). Angka Kelahiran Kasar (CBR)

2. Sasaran Program

A. Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
2. Presentase Baduta Stunting

B. Meningkatnya implementasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk

1. Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan
2. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)

C. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana serta cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan dan kinerja petugas lini lapangan

1. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)
2. Persentase Peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3. Persentase masyarakat yang terjangkau Program bangga kencana
4. Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)
5. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai peran penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas. Oleh karena itu pada keluarga berencana, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera.

Pada tahun 2021 salah satu fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah Revitalisasi Program KB, yang diprioritaskan pada :

- 1) Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- 2) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana;
- 3) Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi;
- 5) Meningkatkan kapasitas SDM, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Rumusan isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR), yaitu :Banyaknya Kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama;
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
4. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
5. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
6. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
7. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
8. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
9. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
11. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

Terkait isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi yang hendak dicapai adalah :

1. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR)
2. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Untuk itulah pada RENJA Perubahan Tahun 2021, tujuan dan sasaran tidak terlepas dari RKPD OPD Tahun 2021 dan RPJMN 2016-2021 yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan meningkatkan :

- (i) Daya jangkauan dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB tenaga lini lapangan;
- (ii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;

- (iii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; serta
- (iv) Sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak.

Dalam perencanaan program dan kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas memiliki prioritas daerah Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan sasaran daerah : 1. Meningkatnya layanan kesehatan, 2. Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif. Prioritas daerah dan sasaran daerah ini sejalan dengan sasaran startegis dan isu-isu strategis.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 - a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan
 - 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - c). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan

- d). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang
 - 5. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Umum Kantor
- f). PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan
 - 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya

II. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan sbb.:

- a). Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk.
 - 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota
 - 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan survei/pendataan Indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan
 - 3. Sub Kegiatan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal
- b). Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

III. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a). Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 1. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
 2. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 3. Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 5. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
- b). Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 1. Sub Kegiatan Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 2. Sub Kegiatan Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)
- c). Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya
 2. Sub Kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode Sub Kegiatan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 4. Sub Kegiatan Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 5. Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- d). Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB

IV. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
3. Sub Kegiatan Orientasi/Pealtihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Sub Kegiatan Promosi dan Sosilisasi kelompok kegiatannketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/UPPKS)
5. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut-usian serta pengelolaan keuangan keluarga)
6. Sub Kegiatan Sosilisasi IPK

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi.

Program dan kegiatan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari bidang-bidang terkait. Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas (terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Rumusan Program

Bab ini Menguraikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan di Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2021. Program yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota,
2. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan,
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kelurga Sejahtera (KS).

Selain didukung oleh APBD Rencana Pendanaan Program yang akan didukung oleh Dana DAK dalam pelaksanaannya diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sehingga dapat Mewujudkan Misi dan Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Tabel 2.5

Rumusan Program dan kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Renja Tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.918.580.050				2.110.438.055
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim selama 1 Tahun	DPPKB Kab.Musi Rawas	600 surat	2.062.500	APBD		600 surat	2.268.750
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 jenis rekening	48.510.000	APBD		3 jenis rekening	53.361.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	7 unit Roda Empat, 56 Unit Roda Dua	20.284.000	APBD		7 unit Roda Empat, 56 Unit Roda Dua	22.312.400
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Admintrasi Keuangan yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 Orang	73.128.000	APBD		5 Orang	80.440.800
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Jumlah jenis	DPPKB Kab.Musi Rawas	19 Jenis 2 Orang	27.718.900	APBD		19 Jenis 2 Orang	30.490.790
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	46 jenis	53.561.200	APBD		46 jenis	58.917.320
8	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	DPPKB Kab.Musi Rawas	6 Jenis	28.426.200	APBD		6 Jenis	31.268.820

9	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	8 Jenis	10.297.300	APBD		8 Jenis	11.327.030
10	Penyediaan Bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Sarana Informasi media massa yang Berlangganan	DPPKB Kab.Musi Rawas	33 Jenis	37.510.000	APBD		33 Jenis	41.261.000
12	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	DPPKB Kab.Musi Rawas	33 kali, 88 Pegawai, 10 Tamu	116.547.200	APBD		30 kali, 88 Pegawai, 10 Tamu	128.201.920
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	17 Kali Dalam Provinsi, 10 Kali Luar Provinsi	219.450.000	APBD		14 Kali Dalam Provinsi, 10 Kali Luar Provinsi	241.395.000
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah	DPPKB Kab.Musi Rawas	30 kali	49.418.050	APBD		30 kali	54.359.855
15	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah Jasa Pendukung Adminitrasi Teknis/ Perkantoran yang dibayar	DPPKB Kab.Musi Rawas	58 Orang TKST, 5 Orang Tenaga Kerja lainnya	1.203.180.000	APBD		58 Orang TKST, 5 Orang Tenaga Kerja lainnya	1.323.498.000
16	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Jumlah jenis Dokumentasi Publikasi dan Dekorasi	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 Jenis	28.486.700	APBD		5 Jenis	31.335.370
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpenuhi	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 jenis	15.000.000	APBD		1 jenis	16.500.000
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor terpenuhi	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 jenis	32.936.000	APBD		1 jenis	36.229.600
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 paket	16.500.000	APBD		1 Unit	18.150.000

4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terpelihara	DPPKB Kab.Musi Rawas	Service, Suku Cadang, BBM (7 Unit kendaraan Roda empat, 56 Unit Kendaraan roda Dua)	175.516.000	APBD		Service, Suku Cadang, BBM (7 Unit kendaraan Roda empat, 56 Unit Kendaraan roda Dua)	193.067.600
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan kantor yang dipelihara	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 Jenis	15.000.000	APBD		3 Jenis	16.500.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit Peralatan kantor yang dipelihara	DPPKB Kab.Musi Rawas	26 Unit peralatan	11.275.000	APBD		26 Unit peralatan	12.402.500
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 orang	48.400.000	APBD		2 orang	53.240.000
2	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek	DPPKB Kab.Musi Rawas	1 Orang	52.146.950	APBD		1 Orang	57.361.645
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	DPPKB Kab.Musi Rawas	5 Jenis Dokumen	32.000.000	APBD		5 Jenis Dokumen	35.200.000
V	Program Keluarga Berencana								
1	Pelayanan KIE	Jumlah Jenis Media yang Digunakan	DPPKB Kab.Musi Rawas	2 Jenis Media	150.566.900	APBD		2 Jenis Media	165.623.590

2	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Kepada PUS Peserta KB Aktif melalui Pemenuhan Operasional Balai Penyuluh KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	15 Balai Penyuluh KB di Kecamatan	1.678.045.600	DAK BIDANG Keluarga Berencana		15 Balai Penyuluh KB di Kecamatan	1.845.850.160
3	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	DPPKB Kab.Musi Rawas	7 jenis	1.193.057.800	APBD		7 jenis	1.312.363.580
4	Pendataan Keluarga	Jumlah Petugas Pendata	DPPKB Kab.Musi Rawas	36 orang, 2 bulan	72.561.500	APBD		36 orang, 2 bulan	79.817.650
5	Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	116 Orang(101 Peserta Aktif 15 Orang Panitia dan Undangan)	58.232.900	APBD		116 Orang(101 Peserta Aktif 15 Orang Panitia dan Undangan)	64.056.190
6	Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB	Jumlah Personal, Jumlah kali	DPPKB Kab.Musi Rawas	8 orang, 4 kali	35.530.000	APBD		8 orang, 4 kali	39.083.000
7	Penyelenggara Manajemen BOKB	Jumlah Orang, Jumlah Kegiatan	DPPKB Kab.Musi Rawas	440 orang 4 kegiatan	114.048.000	DAK BIDANG Keluarga Berencana		440 orang 4 kegiatan	125.452.800
VI	Program Kesehatan Reproduksi Remaja								
1	Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Peserta PUP (Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan)	DPPKB Kab.Musi Rawas	14 Kecamatan	87.576.500	APBD		14 Kecamatan	96.334.150
VII	Program Pelayanan Kontrasepsi KB								
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah pelayanan Peserta KB Baru dan Aktif bagi PUS Keluarga Miskin	DPPKB Kab.Musi Rawas	37 Kali Pelayanan 32 Medis Operasi	181.683.700	APBD		37 Kali Pelayanan 32 Medis Operasi	199.852.070

3	Penyelenggaraan Operasional Klinik KB	jumlah Fasilitas Kesehatan KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	26 Faskes KB	161.379.900	DAK BIDANG Keluarga Berencana		26 Faskes KB	177.517.890
4	Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi	Jumlah Kasus komplikasi kontrasepsi yang ditangani	DPPKB Kab.Musi Rawas	10 Kasus	9.397.300	APBD		10 Kasus	10.337.030
VIII	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri								
1	Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB	Jumlah Petugas Pelaksana Program KB di Lini Lapangan yang dibina	DPPKB Kab.Musi Rawas	398 Orang	1.360.514.100	APBD		398 Orang	1.496.565.510
2	Hari Keluarga Nasional	Terlaksanannya Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tk. Kabupaten Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	DPPKB Kab.Musi Rawas	3 Kegiatan, 1 Tahun	118.651.500	APBD		3 Kegiatan, 1 Tahun	130.516.650
3	Gerakan Kampung KB	Jumlah Gerakan Kampung KB	DPPKB Kab.Musi Rawas	25 kampung kb	1.827.047.750	DAK BIDANG Keluarga Berencana		25 kampung kb	2.009.752.525
IX	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga								
1	Pengembangan Bina Keluarga	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Kegiatan yang Dibina	DPPKB Kab.Musi Rawas	4 Kelompok	48.450.050	APBD		4 Kelompok	53.295.055

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2021 yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas telah diselenggarakan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA) tahun 2021;
2. Walaupun keberhasilan telah dicapai, untuk masa yang akan datang Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas tetap berkomitmen bahwa tanggung jawab Pengendalian Penduduk melalui Keluarga Berencana menuju keluarga bahagia dan sejahtera serta berkualitas adalah tanggung jawab bersama.